



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Temuan BPK Akan Ditindaklanjuti

SELUMA - Dalam Laporan Pemeriksaan Keuangan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu tahun 2021 yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Seluma yang langsung diterima oleh Bupati Seluma terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi temuan.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Seluma Deddy Ramdhai, SE, ME, MA menyampaikan, sejumlah rekomendasi dari BPK berdasarkan hasil LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021 akan segera ditindak lanjuti. "Ada banyak rekomendasi seperti denda pekerjaan proyek fisik, pajak, beberapa rekomendasi pengendalian yang bersifat administratif," ujarnya.

OPD yang terdapat temuan diantaranya, Dinas PUPR terkait kelebihan bayar, denda pekerjaan, pajak. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) juga terkait dengan kelebihan pembayaran. Berikutnya ada RSUD terkait dengan pengadaan dan Disprindagkop dan lainnya. Namun dirinya tidak ingin menyebutkan secara detail jumlah temuan dan OPD apa saja.

"Disdikbud dan PUPR terkait kelebihan bayar akan ditindak lanjuti dalam waktu 60 hari ke depan," terangnya.

Ia mengatakan, bahwa LHP BPK ini merupakan hasil audit keuangan daerah atas kepatuhan belanja daerah tahun 2021. Namun untuk audit reguler BPK akan masuk kembali pada bulan Februari mendatang. "Pemeriksaan biasanya mulai dari bulan Februari, maka dari itu kita minta seluruh OPD untuk bersiap," jelasnya.

Ia mengatakan, ini merupakan kegiatan rutin setelah kegiatan selesai satu tahun BPK akan audit hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Keuangan (LHP) BPK. Namun juga dilakukan pembinaan seperti jika terdapat temuan diminta segera menyelesaikan baik keuangan atau pun administrasi tetapi jika saat pemeriksaan tidak bisa diselesaikan maka mengikuti proses yang dituangkan dalam LHP dan diberi waktu 60 untuk penyelesaian.

"Setiap tahun setelah melakukan kegiatan maka diaudit BPK," terangnya.

Untuk seluruh OPD agar mempersiapkan Spj program yang telah dilaksanakan dengan lengkap dan sah. Terpenting laporan keuangan hasil sudah selesai. "Yang pasti program dan kegiatan harus ada Spj dan lainnya. Kemudian laporan keuangan yang terpenting," jelasnya. (juu)